

ANALISA KESIAPAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN SMART VILLAGE

¹ Hermanto Rohman, ²Dina Suryawati, ³Anwar, ⁴Agus Suharsono

^{1,2,3,4} Universitas Jember

Correspondet author: hermanto.fisip@unej.ac.id

Jember, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

The study was carried out regarding public services, especially opportunities for developing village government innovation through Smart Villages in Jember Regency. The aim of this research is to provide an overview of the results of identifying regional readiness in implementing the Smart Village program and to design a Smart Village model that is in accordance with the results of the village readiness analysis in Jember Regency. The method used in this research is the model-building method, a method intended to produce or develop concepts within the scope of a particular study. Smart village development in Jember Regency needs to pay attention to three levels: enabler, driver and mediator. Important variables include the preparation of regulations and development roadmaps as a reference for service and data integration, as well as the provision of infrastructure using a top-down and bottom-up approach. It is also important to develop an institutional model that involves village government and community participation, as well as increasing human resource capacity which is currently not well structured. Apart from that, it is necessary to develop networks in blank spot areas by involving the Ministry of Communication and Information and collaborating with private providers.

Keywords: Smart village; Smart village Models; Village Government

Abstrak

Kajian dilakukan terkait pelayanan publik khususnya pada peluang pengembangan inovasi pemerintahan desa melalui Smart village di Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran hasil identifikasi kesiapan daerah dalam menjalankan program Smart village serta merancang model Smart village yang sesuai dengan hasil analisis kesiapan desa di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model-building method, sebuah metode yang ditunjukkan untuk menghasilkan atau mengembangkan konsep dalam lingkup kajian tertentu. Pengembangan smart village di Kabupaten Jember perlu memperhatikan tiga tingkatan: enabler, driver, dan mediator. Variabel penting meliputi penyusunan regulasi dan roadmap pengembangan sebagai acuan integrasi layanan dan data, serta penyediaan infrastruktur dengan pendekatan top-down dan bottom-up. Penting juga untuk mengembangkan model kelembagaan yang melibatkan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kapasitas SDM yang saat ini belum terstruktur dengan baik. Selain itu, perlu pengembangan jaringan di wilayah blank spot dengan melibatkan kementerian kominfo dan kerjasama dengan provider swasta.

Kata Kunci: Desa cerdas; Model Desa Cerdas; Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Kajian ini dipilih seiring dengan janji politik bupati terpilih kabupaten Jember Haji Hendy-Gus Firjaun untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan selama ini, secara terukur dan sesuai dengan tata aturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengimplementasikan janji politik tersebut disusun 7 program unggulan salah satunya adalah melalui penerapan program *Smart village* juga dapat digunakan untuk mendeteksi potensi dari desa untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Smart village merupakan konsep yang diadopsi atau konsep turunan dari *Smart city*. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi penerapannya (Essabela, 2016; Meijer, 2015). *Smart village* bisa dikatakan sebagai pengembangan *smart city*, dalam konteks yang lebih kecil yaitu desa melalui penerapan konsep desa berbasis teknologi informasi. Penerapan teknologi Informasi di level desa diatur dalam UU Desa No 6 tahun 2014 pada pasal 86 yang menyatakan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui system informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan system informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan yang akan dikelola oleh pemerintah desa.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember untuk membangun *Smart Village* ini dilakukan oleh Bupati Jember H. Hendy Siswanto bersama Itqon Syauqi selaku ketua DPRD menemui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT). Program *Smart Village* merupakan alat dan sarana Desa untuk mampu bersaing di dunia E-Commerce (22/10221). Kabupaten Jember mengalokasikan anggaran pada tahun untuk membangun ini melalui program pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten yang cerdas sekitar 4 M dan 7 M melalui pengembangan Sumber daya Tehnologi informasi termasuk di Pemerintahan Desa (LKPJ 2021). Melalui anggaran yang besar ini jika tidak dibarengi dengan konsep dan desain yang matang maka Implementasi *Smart village* di Kabupaten Jember dengan dana yang besar namun tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan Asosiasi Kepala Desa bersama tim peneliti Kelompok Riset Public Finance and Public Affairs Governance (PFPAG) LP2M terkait dengan pelayanan publik, terutama peluang untuk pengembangan inovasi pemerintah desa melalui *smart*

village dalam upaya membangun desa yang berkelanjutan dan berkejahteraan yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Jember (22/10221), salah satu yang muncul adalah Pemerintah Kabupaten Jember belum memiliki model pengembangan smart village yang akan dilakukan melalui masterplan atau roadmap apalagi regulasi yang akan digunakan sebagai rujukan. Oleh karena itu kajian ini menjadi penting untuk memberikan masukan pada pemerintah daerah bagaimana kesiapan sekaligus model Smart village untuk dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model-building method, sebuah metode yang ditunjukkan untuk menghasilkan atau mengembangkan konsep dalam lingkup kajian tertentu (Shepherd & Roy, 2017). Menurut Jaccard dan Jacoby (dalam Andhika, 2018) setidaknya terdapat 4 (empat) tahap yang ditempuh dalam mengonstruksikan suatu model atau konsep, yaitu: Pertama, choosing a phenomenon to explain. Kedua, identifying problem areas and questions to focus. Ketiga, identify new questions to answer. Keempat, concerns of theory construction. Pemahaman tersebut dikaitkan isu kontekstual dalam penelitian ini yaitu tentang *Smart village* terutama pada kesiapan kabupaten Jember dalam menjalankan konsep *Smart village* sekaligus menggali basis empiris yang akan digunakan dalam mengkonstruksikan model *Smart village* yang tepat sesuai dengan analisis kesiapan desa meliputi 3 (tiga) elemen yaitu fungsi pemerintahan desa, struktur masyarakat perdesaan dan dukungan lingkungan perdesaan. Eksplorasi ketiga elemen tersebut akan memunculkan uraian peran yang rinci dan rigid serta keterjalinan satu sama lainnya sebagai dasar menyusun Model pengembangan *Smart village* di Kabupaten Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

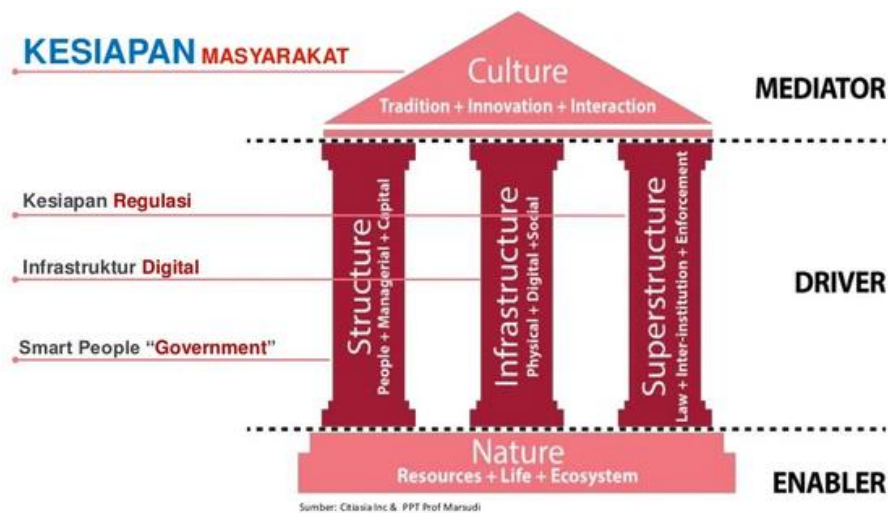
Desa merupakan kesatuan unit dari suatu entitas masyarakat yang memiliki karakter dan tradisi yang khas di mana masyarakatnya menjadi bagian terdepan dan penggerak utama pembangunan sehingga desa diasosiasikan sebagai kesatuan masyarakat hukum (Rauf, 2016; Salim, 2016; Suparman, 2016). Desa juga merupakan kesatuan homogenitas masyarakat yang sederhana dengan mata pencaharian homogen (Purwanto, 2004; Sulistiyono, Surwanto, & Rindarjono, 2015). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang homogen tidak bisa disamakan dengan kota dalam adopsi teknologi informasi.

Dilihat dari perkembangan teknologi informasi, konsep *Smart village* tidak bisa dilepaskan dari perkembangan konsep *Smart city*. Mengadopsi dari sistem smart city maka *Smart village* pada mulanya juga memiliki tujuan yang sama. Yakni memberikan tawaran solusi pada masalah pedesaan, Seperti misalnya masalah kemiskinan,

kesehatan, pendidikan, keterlebelakangan teknologi, kekurangan informasi, dan masalah lainnya khas Kawasan rural.

Berdasarkan kajian literatur salah satunya sebagaimana yang dilakukan Supriadi, H Fadli, & Malik (2016) pengembangan *Smart city* berbeda dengan pengembangan *Smart village*. Pengembangan smart village didasarkan kepada pendekatan dari bawah “bottom-up” atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator.

Membangun kesiapan Pengembangan smart village harus memperhatikan pada tiga tingkatan yaitu pada tingkatan enabler, driver dan mediator sebagaimana dipaparkan dalam materi Smart Village dalam akademi desa oleh Eko Sri Haryanto (2020). Pada tingkatan driver smart village membutuhkan kesiapan dalam structure, Infrastructure dan superstructure untuk menopang berjalannya smart village untuk bisa diterima dimasyarakat, hal ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar 1. Smart Village Eko Sri Haryanto (2020)

Dengan mengacu pada komponen variabel tersebut maka kesiapan penerapan smart village dikabupaten Jember dapat dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1. Kesiapan Penerpan Smart Village di Kabupaten Jember

Variabel Kesiapan	Komponen	Gambaran Lapangan (FGD dan Survey)
Enabler	Potensi Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa desa sudah mengembangkan ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata yang membutuhkan promosi kepada masyarakat Desa juga sudah melakukan program pengembangan usaha melalui pemberdayaan UMKM serta peran dari BUMDES
Driver	Struktur	<ul style="list-style-type: none"> Sudah dilakukan pelatihan perangkat desa berkenaan dengan smart village dan juga digitalisasi desa namun intensitasnya belum maksimal Sudah ada penganggaran dari dana desa untuk internet desa Sudah ada pelatihan Perangkat desa melalui PPIDesa dan kader Informasi masyarakat di desa
	Insfrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada penganggaran dari pemerintah kabupaten untuk penyediaan perangkat multimedia di desa Sudah ada pemasangan Internet dibalai desa Sudah ada penyediaan aplikasi desa untuk pelayanan administrasi masyarakat desa (Lahbako, J-SIP, Sipadu, Simpeda) Beberapa desa juga melakukan pengadaan pembuatan aplikasi desa mandiri yang didanani dari dana desa Sudah ada upaya memperkecil wilayah Blank spot (wilayah yang tidak terjangkau signal) dari 93 Desa dari 13 Kecamatan, kini hanya tinggal 65 desa di 9 Kecamatan
	Superstruktur	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya regulasi yang diterbitkan daerah terkait dengan Smart Village (Perbup, Master Plan/Roadmap Pengembangan Smart Village) Belum adanya model kelembagaan didesa yang mengawal keberlanjutan Smart village Belum ada panduan baku untuk pelaksanaan smart village baik dalam peran maupun konten yang perlu dijalankan
Mediator	Culture	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada beberapa desa yang menerapkan inovasi dan interaksi dalam pelayanan berbasis digital namun ini keberlanjutannya sulit terjaga

Sumber: Analisa hasil FGD dan Survey, 2021

Berdasarkan gambaran tersebut secara umum sebetulnya kesiapan di kabupaten jember dalam upaya menuju smart village dari beberapa variabel dan komponen sudah mulai muncul. Namun dari semua kesiapan yang sudah dijalankan itu ada beberapa kelemahan yang berpotensi menjadi penghambat dalam pengembangan smart village diantaranya :

1. Dalam pengembangan Smart Village penyusunan Regulasi serta roadmap pengembangan menjadi penting, karena keberadaan regulasi ini akan menjadi acuan pengembangan smart village yang memuat dimensi yang dilakukan secara top down

dalam hal ini pada pengembangan integrasi layanan dan data serta penyediaan infrastruktur, serta ada dimensi bottom up yang harusnya diberikan acuan dan standart pengembangan

2. Dalam pengembangan smart village dijember belum ada model atau konsep kelembagaan terkait dengan struktur dan tanggung jawab yang melibatkan peran pemerintah desa serta mendorong partisipasi masyarakat
3. Dalam pengembangan smart village dijember pengembangan kapasitas SDM masih belum terpola jelas terutama dalam peningkatan kompetensi SDM, hal ini disebabkan karena model serta kelembagaan yang akan didorong dalam pengembangan Smart Village masih belum jelas
4. Masih adanya wilayah Blank spot (wilayah yang tidak terjangkau signal) yaitu pada 65 desa di 9 Kecamatan yang memerlukan solusi dan strategi dengan melibatkan beberapa pihak terkait termasuk dengan kementerian kominfo atau kerjasama dengan provider swasta

Selain itu dalam mendorong pengembangan Smart village Pemerintah kabupaten Jember agar lebih akseleratif harus duduk bersama dengan beberapa desa yang didorong sebagai pilot proyek dalam pengembangan model Smart Village di kabupaten Jember, hal ini penting untuk menghilangkan kesan bahwa smart village bukan hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi sebagai tujuan atau "goals" yang kemudian diterapkan di desa melalui berbagai aplikasi yang akan dilaunching dan diterapkan didesa dan oleh masyarakat. Karena idealnya model Smart Village yang harusnya dilakukan dikabupaten Jember harus menyentuh pada 3 point utama diantaranya adalah :

Pertama Smart Village adalah upaya mendorong pemerintah Desa Cerdas (*Smart Village government*) hal ini bisa dilakukan dengan pengembangan kapasitas dan aplikasi di desa yang memudahkan pelayanan administrasi desa dan pelayan publik dari pemerintahan kabupaten yang dapat diintegrasikan kedesa, untuk mendorong ini perlu dilakukan melalui konsep top down dan sistem terintegrasi dari desa ke pemerintahan kabupaten dengan visi membangun satu data dalam pembangunan. Aplikasi yang bisa dikembangkan adalah Pelayanan kepengurusan adminduk, Sistem pelayanan administrasi surat menyurat dan arsip, Sistem inventarisir manajemen aset desa, Sistem keuangan desa, Sistem Musdes online, Laporan keluhan warga terupdate, Berita/Pengumuman desa, Pelayanan pembayaran PBB online, Pelayanan permintaan data dan informasi, Pelayanan permintaan fasilitasi penggunaan aset milik desa (peminjaman barang dan alat), Sistem pengajuan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial, Serta statistik/data desa.

Kedua, Smart Village dikembangkan dalam rangka mendorong Ekonomi di desa yang cerdas (*Smart economi*). Berbeda dengan smart government maka pola yang

dilakukan adalah sifatnya Bottom Up , karena ini akan terkait dengan potensi dimasing-masing desa yang berbeda. Maka partisipasi dari pemerintah desa untuk bisa mengidentifikasi potensi dengan membranding potensi desanya harus didorong dan difasilitasi. Ruang partisipasi juga terwadahi dalam pengembangan aplikasi yang akan dilakukan, peran pemerintah daerah bisa dengan memberikan hibah kompetisi dengan pengembangan aplikasi yang membranding karakter unggulan dan bisnis desa yang dibangun berdasarkan potensi desanya dan ini tentu bisa dilakukan dengan melibatkan BUMDES dan pendampingan Perguruan Tinggi atau Komunitas relawan TIK.

Ketiga, Smart Village adalah harus mendorong masyarakat desa yang cerdas. Hal ini bisa dilakukan dengan bisa memerankan peran dari Kader Informasi Masyarakat (KIM) untuk bisa mendorong literasi digital pada masyarakat dan dalam jangka panjang bisa melahirkan komunitas komunitas sosial maupun bisnis atau ekonomi kreatif dari masyarakat terutama generasi muda. Pola yang dapat dilakukan dengan membangun kolaborasi dengan komunitas melalui lomba konten kreator atau pengembangan aplikasi yang berbasis pada kreativitas budaya dan ekonomi lokal desa.

Mendorong model Smart village melalui tiga point tersebut tetap harus memperhatikan berapa Kesiapan yang harus diperhatikan pemerintah daerah yaitu kesiapan infrastruktur pendukung TIK misalnya jaringan Internet, Kesiapan Superstruktur yang didalamnya terkait dengan adanya roadmap atau regulasi serta model kelembagaan dari desa sampai kabupaten, Kesiapan struktur dalam hal ini kesiapan anggaran serta SDM baik di perangkat desa maupun masyarakat dan ini tentunya perlu digiatkan melalui kegiatan literasi digital dan menekankan pada kolaborasi multipihak. Jika konsep ini dijalankan impian bupati untuk mendorong kabupaten Jember Cerdas bisa terwujud

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa Pengembangan smart village di Kabupaten Jember perlu memperhatikan tiga tingkatan: enabler, driver, dan mediator. Variabel penting meliputi penyusunan regulasi dan roadmap pengembangan sebagai acuan integrasi layanan dan data, serta penyediaan infrastruktur dengan pendekatan top-down dan bottom-up. Penting juga untuk mengembangkan model kelembagaan yang melibatkan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kapasitas SDM yang saat ini belum terstruktur dengan baik. Selain itu, perlu pengembangan jaringan di wilayah blank spot dengan melibatkan kementerian kominfo dan kerjasama dengan provider swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. "Penerapan Konsep Smart Governance Pada Smart Village." Diakses pada 7 Maret 2019. <https://kumparan.com/royan-aditama/penerapan-konsep-smart-governance-pada-smart-village-1522820469658>
- Andari, Rosita Novi, and Susy Ella. "Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia." *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 1 (2019): 41-58.
- Angkasawati, Angkasawati. "Masyarakat Desa." *Jurnal PUBLICIANA* 8, no. 1 (2015): 72-87.
- Ayu, Y. S. P. "Membangun Indonesia dari Pinggiran Melalui Smart Village." Diakses pada 7 Maret 2019. <https://www.kompasiana.com/pkdodlanri/5a992c7edd0fa859045db843/membangun-indonesiadari-pinggiran-melalui-smart-village?page=all>
- Brian Heap. 2015. *Smart Village: New Thingking for off-grid communities worldwide*. Research Associate of the Centre of Development Studies University of Cambridge from https://www.researchgate.net/publication/280737024_Smart_Villages_pdf_link_e4svorgnew-thinking
- Badri, Muhammad. "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)." *Jurnal Dakwah Risalah* 27, no. 2 (2016): 62-73.
- Chatterjee, Sheshadri, and Arpan Kumar Kar. "Concept of Smart Village in India: A Proposed Ecosystem and Framework." In *Advances in Smart Cities*, pp. 83-92. Chapman and Hall/CRC, 2017.
- Dengen, Nataniel, and Heliza Rahmania Hatta. "Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser." *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer* 4, no. 1 (2009): 47-54.
- Essabela, S. "Menuju Konsep Smart City. Diakses pada 3 Maret 2019." https://www.researchgate.net/publication/322303099_Menuju_Konsep_Smart_City.
- European Network for Rural Development no 26 ISSN 1831-532
- Fahlefi, Zul. "Penerapan Teknologi Informasi Bagi Pelaksanaan Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada BP2TSP Kota Samarinda)." *Jurnal Paradigma (JP)* 3, no. 2 (2017): 155-166.
- Fajrillah, Mohamad, Z., & Novarika, W. "Smart City Versus Smart Village". *Jurnal Mantik Penusa* 22, no. 1 (2018): 1-6.
- Govindaraju, Rajesri, Iwan Inrawan Wiratmadja, and Avif Haryana. "Pengembangan Model Evaluasi Kualitas Layanan Sistem E-Government." *Journal of Technology Management* 15, no. 2 (2016): 196-205.
- Hatu, Rauf. "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)." *Jurnal Inovasi* 8, no. 04 (2011).
- Herdiana, Dian "Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages, IPTEK-KOM, Vol. 21 No. 1, Juni 2019: 1 - 16
- Holle, Erick S. "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government; Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service." *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011).
- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Indonesia.
- Kushandajani. "Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa." *Jurnal Yustisia*, 4, no. 2 (2015): 369-396.
- Manuel Pedro Rodríguez Bolívar. "Governing the Smart City: A Review of The Literature on Smart Urban Governance." *International Review of Administrative Sciences* 82, no. 2 (2016): 392-408.
- Munir, D. "SMART VILLAGE: Desa Maju, Desa Bahagia." *APEKSI: Asosiasi*
-

- Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, 2017.
- Nazaruddin, A. "Loram Wetan Desa Cerdas Kedua di Indonesia." *Antaranews.Com*. Diakses pada 2019. <https://www.antaranews.com/berita/672761/loram-wetan-desa-cerdas-kedua-di-indonesia>, 2017.
- Prakoso, R. "Kesiapan Kota di Indonesia dalam Mengimplementasikan Gerakan Menuju 100 Smart City." Diakses 2019. https://www.academia.edu/36604463/Kesiapan_Kota_Di_Indonesia_Dalam_Mengimplementasikan_Gerakan_Menuju_100_Smart_City, 2018
- Purwanto, S. A. "Mencari Alternatif Mata Pencarian Lokal: Kontribusi Metodologis Untuk Praktis Pengembangan Komunitas." *Jurnal Analisis Sosial*, 9, no. 3 (2004): 127-142.
- Ramachandra, T. ., Hedge, G., Chandran, M. D. S., Kumar, T. A., & Swamiji, V. *Smart Villages Framework*. Accessed pada 13 Juni 2019. <http://wgbis.ces.iisc.ernet.in/biodiversity/pubs/ETR/ETR90/sec2.html>, 2015.
- Usman, Nur Apri Ramadan L. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Penguatan Desa Adat di Desa Bentenan Kabupaten Minahasa Tenggara." *Lex Et Societatis* 3, no. 7 (2015): 121-130.
- Ramesh, B. "Concept of Smart Village and it's Impact on Rurbanization." *International Journal of Trend in Scientific Reseach and Development* 2, no. 3 (2018): 1948-1950.
- Rauf, Muhammad A. "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 413-429.
- Sabardi, L. 2013. "Konstruksi Makna Yuridis Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43(2), 170-196.
- Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015): 24-32.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depa." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 244-255.
- Shepherd, Dean A., and Roy Suddaby. "Theory building: A review and integration." *Journal of Management* 43, no. 1 (2017): 59-86. <https://doi.org/10.1177/0149206316647102>
- Silahunudin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Suparman, Asep. "Desa dan Hak-Hak Tradisional." *Jurnal Wawasan Yuridika* 26, no. 1 (2014): 464-470.
- Utomo, Chandra EW, and Mochamad Hariadi. "Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota." *J. Strategi dan Bisnis* 4, no. 2 (2016): 159- 176.
- Viswanadham, N., & Vedula, S. *Design of Smart Villages*. Accessed June 13, 2019. <https://drona.csa.iisc.ac.in/~nv/Mypublications/C/z.pdf>, 2010.
- Yunita, Novi Prisma, and Rudi Dwi Aprianto. "Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan E-Government di Indonesia: Analisis Website." In *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*, pp. 329-336. 2018.